

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus Pada Kota Di Jawa Barat)

*Renny Nur'ainy*¹
*Desfitriana*²
*Rooswhan Budi Utomo*³

¹*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma Jakarta*
²*Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Taman Siswa Palembang*
³*Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma Jakarta*
^{1,3}{renny, rooswhan}@staff.gunadarma.ac.id
²zulfadhliatus@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah tingkat Kota di Jawa Barat. Populasi penelitian adalah pemerintah daerah seluruh Indonesia. Sampel penelitian adalah Kota yang ada di Jawa Barat. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode convenience sampling. Data sekunder penelitian ini bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD Kota di Jawa Barat tahun 2008-2010, yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan penggunaan data penelitian terbebas dari BLUE. Untuk menguji hipotesis digunakan uji t dan uji F, serta uji determinasi (R^2). Hasil penelitian membuktikan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan dua faktor yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah, Kota di Jawa Barat

PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan kemandirian pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan pertumbuhan barang dan jasa yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah provinsi/Kabupaten/Kota. Menurut Boediono dalam Situngkir (2009) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita yang diukur dengan PDRB perkapita.

Kemandirian keuangan suatu daerah harus mampu mengatur dan mengelola segala bentuk penerimaan dan pembiayaannya tanpa harus tergantung pemerintah pusat (Haris, 2005). Blakely (1994) dalam Darwanto (2007) mengemukakan pentingnya peran pemerintah dengan mengemukakan sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi sektor industri, teknologi, pasar ekspor, situasi perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan. Boediono (1985) menya-

takan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* alam jangka panjang. Dengan demikian pemakaian indikator pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dalam kurun waktu sepuluh, dua puluh, lima puluh tahun atau bahkan lebih.

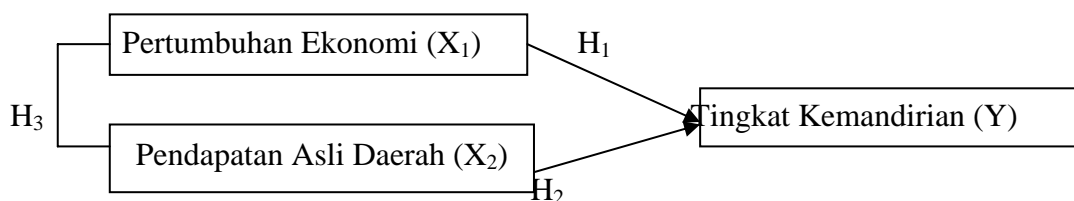
Kemandirian fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah seperti pajak dan retribusi daerah dan lain-lain, serta pembangunan daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai kemandirian fiskal yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintah daerah secara finansial harus sebanyak mungkin menggali sumber pendapatan asli daerah seperti pajak, retribusi dan sebagainya (Radianto, 1997).

Deviyantoro (2009) dalam penelitiannya di Banten membuktikan bahwa ada keeratan hubungan antara pertumbuhan pendapatan asli daerah dengan tingkat kemandirian kota "X". Putro (2009) melakukan penelitian di Jawa Tengah menemukan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah tidak

berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Penelitian Abrar (2010) di Aceh menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berkembang dengan tren yang positif setiap tahunnya. PDRB provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bergerak pada arah yang positif dengan pertumbuhan rata-rata per tahun 2,84 persen. Hubungan pendapatan asli daerah dengan PDRB menunjukkan fungsi kuadrat yang perlu diwaspadai posisinya dimasa depan, karena pada data tahun terakhir telah menunjukkan kondisi yang semakin menurun.

Berdasarkan uraian tersebut maka pertanyaannya adalah apakah pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Kota yang ada Jawa Barat baik secara parsial maupun simultan?

Atas dasar itu berikut ini disajikan keterhubungan variabel yang digunakan dalam penelitian ini melalui model penelitian sebagai berikut:



Berdasarkan model penelitian tersebut maka pengembangan hipotesis yang dibentuk adalah:

- H₁: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
- H₂: Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
- H₃: Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah berpengaruh

terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah pemerintah daerah seluruh Indonesia. Sampel penelitian adalah wilayah Kota di Jawa Barat. Pengambilan sampel penelitian dengan metode *convenience sampling*.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data adalah data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2008-2010, yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah dengan alamat www.djpk.depkeu.go.id. Data yang diperoleh berupa data pertumbuhan ekonomi, jumlah realisasi anggaran pendapatan asli daerah dan kemandirian keuangan daerah wilayah Kota di Jawa Barat.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, mencatat dan menghitung data yang berhubungan dengan penelitian.

Operasionalisasi Variabel Penelitian

1. Pertumbuhan ekonomi (X_1)

Pertumbuhan ekonomi adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan perekonomian daerah dari tahun ke tahun berikutnya yang diprosikan dengan PDRB.

2. Pendapatan asli daerah (X_2)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3. Kemandirian keuangan daerah (Y)

Derajat kemandirian keuangan daerah diprosi dari rasio antara pendapatan asli daerah dengan total

penerimaan APBD tahun yang sama dan dinyatakan dalam persen.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis statistik yang dilakukan untuk membuktikan hipotesis penelitian. Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan penggunaan data pada penelitian terbebas dari BLUE (Ghozali, 2006). Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan uji t dan uji hipotesis secara simultan menggunakan uji F. Uji determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui besarnya kemampuan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah dalam memprediksi variabel kemandirian keuangan daerah. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Data diolah dengan bantuan *software* SPSS seri 16.00. Adapun persamaan regresi berganda penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kemandirian keuangan daerah

X_1 = Pertumbuhan ekonomi

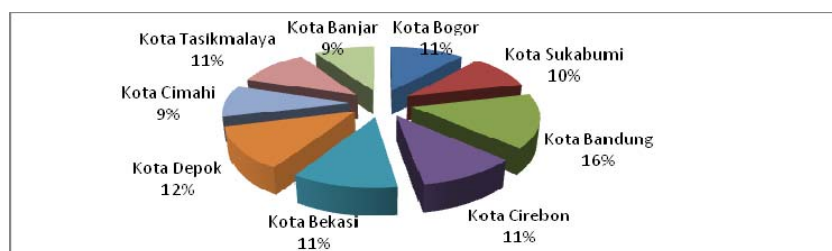
X_2 = Pendapatan asli daerah

b_1, b_2 = Koefisien regresi untuk masing-masing variabel X

e = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Grafik berikut ini mendeskripsikan data pertumbuhan ekonomi (PDRB) berdasarkan Kota di Provinsi Jawa Barat.



Grafik 4.1

Pertumbuhan Ekonomi Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2010

Sumber: Data diolah SPSS, 2012

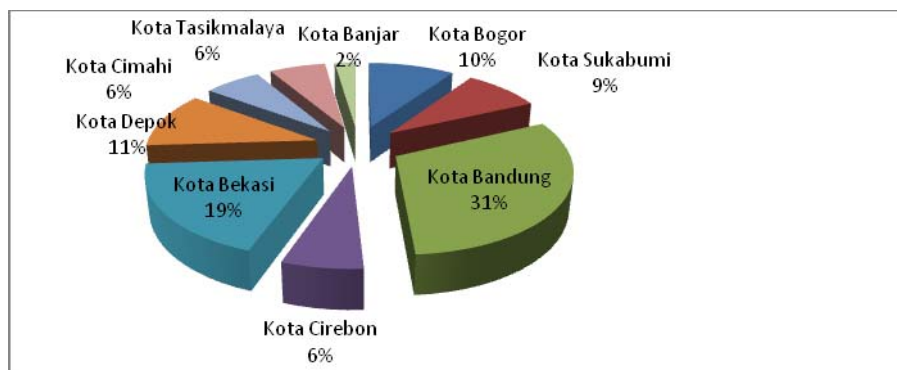
Kota di Provinsi Jawa Barat yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi terbesar adalah Kota Bandung 16%, dan terkecil 9% Kota Cimahi. Kota Bandung memiliki pertumbuhan sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, dan industri yang dari tahun ke tahun semakin tinggi. Kota Bandung merupakan target para investor untuk menginvestasikan modal yang dimilikinya, sehingga pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung memiliki kontribusi terbesar dibandingkan kota lain.

Grafik berikut menyajikan deskripsi pendapatan asli daerah berdasarkan Kota wilayah masing-masing yang terdapat di Provinsi Jawa Barat.

Tingkat pendapatan asli daerah terbesar adalah Kota Bandung 31%, dan terkecil 2% Kota Banjar. Kota Bandung memiliki penerimaan pendapatan dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak lainnya yang sangat besar. Kota Bandung merupakan kawasan bisnis yang memiliki banyak tempat yang menghasilkan pajak dibandingkan kota lainnya yang ada di Provinsi Jawa Barat.

Berikutnya adalah deskripsi data kemandirian keuangan daerah:

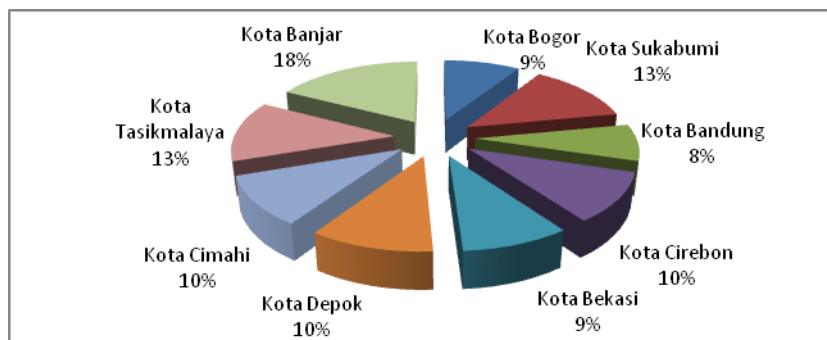
Kota di Provinsi Jawa Barat yang memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah terbesar pada tahun 2008-2010 adalah Kota Banjar sebesar 18%, dan yang terkecil 8% merupakan kontribusi dari Kota Bandung.



Grafik 4.2

Pendapatan asli daerah Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2010

Sumber: Data diolah SPSS, 2012



Grafik 4.3

Kemandirian Keuangan Daerah Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2010

Sumber: Data diolah SPSS, 2012

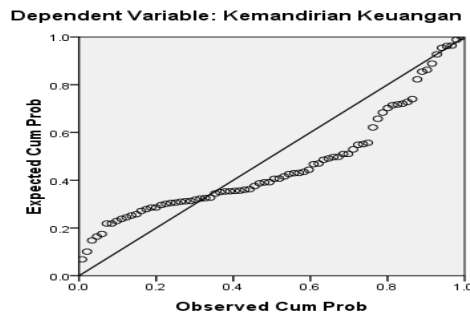
Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik penelitian ini menunjukkan hasil yang telah memenuhi syarat pengujian, yaitu terbebas dari

masalah BLUE (Ghozali, 2006). Berikut ini disajikan hasil uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

Gambar 4.4
Hasil Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Data diolah SPSS, 2012

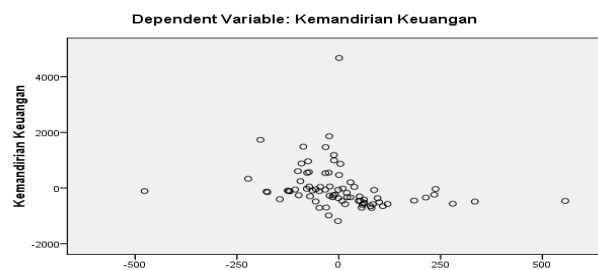
Tabel 4.1
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pertumbuhan Ekonomi	.922	1.084
	Pendapatan Asli Daerah	.695	1.439

Sumber: Data diolah SPSS, 2012

Gambar 4.5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Partial Regression Plot



Sumber: Data diolah SPSS, 2012

Hasil Uji t (parsial) dan Uji F (simultan)

Tabel 4.2
Hasil Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2391.567	377.168		6.341	.000
Pertumbuhan Ekonomi	1.520	.689	.236	2.205	.031
Pendapatan Asli Daerah	2.672	.000	.386	3.131	.002

a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan

Sumber: Data diolah SPSS, 2012

H₁: Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemandirian keuangan daerah

Pada tabel 4.2 variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai *p-value* 0.031 (0.031 < 0.05), maka H₁ diterima. Ini membuktikan pertumbuhan ekonomi (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Putro (2009) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

H₂: Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah

Sementara variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai *p-value* 0.002 (0.002 < 0.05), maka H₂ diterima. Ini membuktikan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Deviyantoro (2009) yang menemukan bahwa pendapatan asli daerah memiliki hubungan yang sangat tinggi terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Tabel 4.3 menunjukkan nilai signifikan 0.000 lebih kecil dari nilai probabilitas (*p-value*) 0.05. Ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah berpengaruh secara simultan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Tabel 4.3
Hasil Uji F
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1.328E7	3	4428173.667	6.903	.000 ^a
Residual	4.747E7	74	641460.836		
Total	6.075E7	77			

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan

Sumber: Data diolah SPSS, 2012

Tabel 4.4
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.676 ^a	.580	.356	3.913	1.816

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan

Sumber: Data diolah SPSS, 2012

Tabel 4.5
Hasil Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2391.567	377.168		6.341	.000
	Pertumbuhan Ekonomi	1.520	.689	.236	2.205	.031
	Pendapatan Asli Daerah	2.672	.000	.386	3.131	.002

a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan

Sumber: Data diolah SPSS, 2012

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada kolom *adjusted R square*, yang ditampilkan pada tabel 4.4.

Nilai R 0.580 atau 58% menunjukkan hubungan atau korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah adalah sedang karena berada dikisaran 0.50-0.699 (Riduwan dan Kuncoro, 2007). Nilai *Adjusted R Square* 0.356 atau 35.6%, ini menunjukkan bahwa variabel kemandirian keuangan daerah dapat dijelaskan oleh variabel pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah sebesar 35.6%, sisanya sebesar 0.644 atau 64.4% dijelaskan oleh faktor lain diluar penelitian ini, misalnya Belanja Daerah. *Standar Error of Estimate* (SEE) 3.913. Makin kecil nilai SEE maka model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.

Analisis Regresi Linear Berganda

Berikut ini adalah pengolahan data dengan menggunakan metode regresi linier berganda dengan hasil persamaan regresi sebagai berikut:

Dari tabel 4.5 persamaan regresi untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah adalah:

$$Y = 2391.567 + 1.520X_1 + 2.672X_2 + e$$

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan. Pembangunan ekonomi ini dapat ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan pertumbuhan barang dan jasa yang antara lain diukur dengan besarnya Produk Domestik Bruto

(PDB) pada tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk daerah provinsi maupun daerah Kabupaten atau Kota.

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang dapat mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004). Kenyataan yang terjadi dalam pemerintah daerah saat ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal, hal tersebut dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal yang dianggarkan dengan total anggaran belanja daerah. Dalam pengelolaan anggaran, asas kemandirian dijadikan dasar pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan dari daerahnya sendiri.

Kemandirian dalam APBD terkait dengan kemandirian pendapatan asli daerah, sebab semakin besar sumber pendapatan dari potensi daerah, bukan dari bantuan, maka daerah semakin leluasa mengakomodasikan kepentingan masyarakatnya tanpa muatan pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Pemerintah daerah didalam membiayai belanja daerahnya, selain dengan menggunakan transfer dari pemerintah pusat, mereka juga menggunakan sumber dananya sendiri yaitu pendapatan asli daerah.

Bagi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian, hal yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) yang antara lain bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Upaya untuk meningkatkan PAD tidak memberikan arti apabila tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Pendapatan asli daerah ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan masih sering mengalami kendala, yaitu berupa rendahnya kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD. Indikator rendahnya kemampuan daerah ini dapat dilihat dari Indeks Kemampuan Rutin (IKR) daerah, yang diperoleh dari besarnya perubahan PAD terhadap pengeluaran rutin daerah dalam persentase tahun yang sama. Namun demikian pengembangan dan penggalian potensi PAD merupakan kebutuhan yang sangat mendasar, mengingat pendapatan asli daerah sangat mendukung terwujudnya pelaksanaan otonomi yang utuh, nyata dan bertanggungjawab di daerah Kota, serta dapat berperan penting dalam rencana peningkatan kemandirian pemerintah daerah untuk tidak selalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan propinsi. Secara umum strategi untuk peningkatan pendapatan daerah dalam upaya untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya yaitu kemampuan administrator (SDM), kemampuan keuangan daerah, keadaan infrastruktur.

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas harus dilaksanakan dengan baik. Kedua aspek tersebut menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk dibidang pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Akuntabilitas

publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan seluruh aktivitas dan kerja finansial Pemerintah Daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2002). Dengan demikian pengamat ekonomi, pengamat politik, investor, hingga rakyat mulai memperhatikan setiap kebijakan dalam pengelolaan keuangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Ini menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini disebabkan kemandirian dalam APBD sangat terkait dengan pendapatan asli daerah. Semakin besar sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah, bukan sumber pendapatan dari bantuan, maka daerah semakin leluasa mengakomodasikan kepentingan masyarakatnya tanpa muatan kepentingan pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Kedua faktor pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah mampu mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah, dimana dalam penelitian sebelumnya kemandirian keuangan daerah hanya dikaitkan dengan satu variabel saja yaitu pertumbuhan pendapatan asli daerah. Dalam rangka mengoptimalkan tingkat kepercayaan publik, pemerintah daerah setempat dapat melakukan pergeseran komposisi belanja. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pada

gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002).

Untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas atau menambah sampel penelitian seperti sampel dari luar Propinsi Jawa Barat, bila perlu melakukan penelitian pada seluruh propinsi di Indonesia dengan menambah periode pengamatan. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel atau faktor lain yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, M. 2010. Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9, 79-88.
- Boediono. 1985. *Pengantar ilmu ekonomi No. 4*. Yogyakarta: BPFE.
- Darwanto, & Yustikasari, Y. 2007. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, 8, 1.
- Deviyantoro, & Satria, J. 2009. Hubungan pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) dengan tingkat kemandirian kota "X" di Provinsi Banten. *Jurnal Prospek*, Vol.2 No. 1.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi analisis multivariat dengan program SPSS*. Edisi Empat. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Haris, S. 2005. *Desentralisasi dan otonomi daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Kuncoro, M. 2004. *Otonomi dan pembangunan daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Putro, N.S. 2009. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap peng-

- alokasian anggaran belanja modal (studi kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro*.
- Radianto. 1997. *Otonomi keuangan daerah tingkat II: Suatu studi di Maluku*. Prisma Nomor 3.
- Situngkir, A. 2009. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap anggaran belanja modal pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara. *Tesis*. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan.
- www.djpk.depkeu.go.id, diakses pada 24 Januari 2011, pk. 20.15 wib.